

# THE INFLUENCES OF SOUTH CHINA SEA CONFLICT TOWARD SOUTHEAST ASIA'S SECURITY DILEMMA IN 1947 – 2011

**Wulan Asih Novianti\*, Ridwan Melay\*\*, Tugiman\*\*\***

**Email: wulanasihnovianti@gmail.com, ridwanmelay@yahoo.com**

**Phone Number: 0853-6365-5088**

**History Education**

**Faculty of Teachers Training and Education – University of Riau**

***Abstract:** South China Sea region is an area that has variety of huge potential, which is a potential of natural resources such as petroleum, natural gas and natural resources in the form of fish which are abundant in it. South China Sea has very strategic location so the sea passed by vessels from developed countries, as the world's oil distribution lines, cruise lines and international communications. It attracts a lot of countries that require natural resources for the development of industrialization, both countries bordering the South China Sea region, as well as the major countries that have global ambitions of its own for the personal interests of each country. The purpose of this study was to know the history of the South China Sea conflict and the influences of the South China Sea conflict toward Southeast Asia's security dilemma in 1947-2011. The method used in this research was historical or documentary method. The data obtained through technical literature and documentation. The results of the study showed the high dynamics of the interaction between claimants states in South China Sea due to the capability of the economic, political, and military in the region. Border conflicts and overlapping claims in the South China Sea region still frequently occur among the countries bordering the waters that has huge natural resources and very strategic position. It is becoming a debate between claimants states. The conflicts in the South China Sea involving the People's Republic of China (PRC), Vietnam, Malaysia, Taiwan, Philippines, and Brunei Darussalam induces political and security implications that caused by the friction of interests among countries involved in the interests of each country. If the implications are left alone and not handled quickly, then there is a possibility of open war, which could harm the countries involved, and also the countries around the South China Sea.*

**Key Words: Influences, Conflict, South China Sea, Security Dilemma, Southeast Asia**

# **PENGARUH KONFLIK LAUT TIONGKOK SELATAN TERHADAP STABILITAS KEAMANAN ASIA TENGGARA TAHUN 1947-2011**

**Wulan Asih Novianti\*, Ridwan Melay\*\*, Tugiman\*\*\***

**Email: wulanasihnovianti@gmail.com, ridwanmelay@yahoo.com**

**No.Hp: 0853-6365-5088**

**Pendidikan Sejarah FKIP-Universitas Riau**

**Abstrak:** Kawasan Laut Tiongkok Selatan adalah kawasan yang memiliki potensi yang sangat besar, yakni potensi sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam juga kekayaan alam berupa hasil ikan melimpah yang terkandung di dalamnya. Laut Tiongkok Selatan memiliki letak yang sangat strategis sehingga banyak dilalui oleh kapal-kapal milik Negara maju, sebagai jalur distribusi minyak dunia, jalur pelayaran serta komunikasi internasional. Hal ini banyak menarik perhatian Negara-negara yang sangat membutuhkan sumber daya alam untuk perkembangan industrialisasinya. Baik Negara-negara yang berbatasan langsung dengan Kawasan Laut Tiongkok Selatan, maupun Negara-negara besar yang mempunyai ambisi global tersendiri bagi kepentingan pribadi masing-masing Negara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah konflik Laut Tiongkok Selatan dan pengaruh konflik Laut Tiongkok Selatan terhadap stabilitas keamanan Asia Tenggara tahun 1947-2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis atau dokumenter. Data yang diperoleh melalui teknik kepustakaan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan tingginya dinamika interaksi antara negara-negara pengklaim di Laut Tiongkok Selatan dikarenakan kapabilitas ekonomi, politik, dan militer di kawasan ini. Konflik perbatasan dan klaim tumpang tindih yang terjadi di kawasan Laut Tiongkok Selatan masih kerap terjadi di antara negara-negara yang berbatasan langsung dengan perairan yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki posisi yang sangat strategis tersebut. Hal ini menjadi perdebatan antar negara-negara pengklaim kawasan tersebut. Konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan melibatkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Vietnam, Malaysia, Taiwan, Filipina, dan Brunei Darussalam ini menimbulkan implikasi-implikasi politik dan keamanan yang diakibatkan oleh adanya pergesekan kepentingan-kepentingan di antara Negara-negara yang terlibat demi kepentingan masing-masing negara. Apabila implikasi-implikasi tersebut dibiarkan begitu saja dan tidak ditangani dengan cepat maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perang terbuka, yang dapat merugikan negara-negara yang berkonflik, dan juga negara-negara yang ada di sekitar Laut Tiongkok Selatan.

**Key Words: Pengaruh, Konflik, Laut Tiongkok Selatan, Stabilitas, dan Asia Tenggara**

## PENDAHULUAN

Setelah terbentuknya hukum internasional khususnya mengenai pembentukan dan batas negara modern maka perairan bumi yang luasnya mencapai 361.132.000 km<sup>2</sup> menjadi terbagi dan dimiliki oleh negara-negara, tetapi tidak semua perairan yang ada di dunia ini dimiliki oleh satu negara tetapi terdapat juga perairan dimiliki oleh banyak negara. Seperti Laut Jawa yang dimiliki oleh Indonesia sepenuhnya, sedangkan Selat Malaka yang penguasaannya dimiliki oleh beberapa negara yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura. Begitu luasnya perairan membuat banyak negara mengalami kesulitan atau bahkan memanfaatkan "buram" nya batasan wilayah kelautan suatu negara demi supremasi baik ekonomi dan politik, berbeda dengan daratan yang batas antar negara bertetangga dapat dengan jelas dibatasi dibandingkan wilayah lautnya. Hal tersebut dapat menjadi penyebab konflik antar negara bertetangga, sebab laut adalah wilayah yang sangat sulit dikontrol kedaulatannya oleh negara. Tidak sedikit, karena permasalahan perbatasan dan saling mengklaim wilayah perairan khususnya laut menjadi akar masalah konflik antar negara bahkan melibatkan banyak negara seperti konflik Laut Tiongkok Selatan.<sup>1</sup>

Ide tentang kedaulatan maritim adalah kreasi yang relatif baru, lahir pada tahun 1945 ketika Amerika Serikat menyatakan niat untuk menegaskan kedaulatan di wilayah perairannya dan inilah sesungguhnya yang menjadi dasar klaim berbagai negara Asia Tenggara atas Kepulauan Spratly dan Paracel. Tiongkok mengklaim Kepulauan Spratly dan Paracel berdasarkan "klaim-klaim historis", yakni bahwa kepulauan tersebut selama ribuan tahun menjadi bagian tidak terpisahkan dari perbatasan daratan di Utara Beijing. Berbagai ekspedisi kepulauan itu menemukan bermacam artefak Tiongkok, seperti keramik Tiongkok dan uang tembaga dari dinasti Tang dan Song yang dipakai menopang "klaim-klaim historis" tersebut dan membuktikan bahwa kepulauan itu sudah lama merupakan bagian dari Tiongkok. Kepulauan tersebut adalah bagian dari *folklore* budaya Tiongkok yang dihidup-hidupkan dalam berbagai kutipan semangat pionir Tiongkok oleh artikel-artikel yang ditulis para jurnalis Tiongkok yang rutin mengunjungi kepulauan tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pergantian nama China ke Tiongkok telah diatur oleh pemerintah. Istilah China tersebut, dinilai telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam hubungan sosial warga bangsa Indonesia dari keturunan Tionghoa, untuk itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera itu. Diakses <http://www.antarane.ws.com/berita/425081/keppres-penggantian-istilah-china-menjadi-tionghoa-ditandatangani>, pada 1 Mei 2015, pukul 08:51 Wib.

<sup>2</sup> Martin Jacques. 2011. *When China Rules The World (Ketika China Menguasai Dunia)*. Diterjemahkan oleh Noor Choliz dan Jarot Sumarwoto. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Hal. 327.



Gambar 1.1: Laut Tiongkok Selatan

Ada dua aspek yang membuat Laut Tiongkok Selatan menjadi penting bagi negara manapun, yakni:<sup>3</sup>

1. Letak Strategis. Secara Geografi Laut Tiongkok Selatan dikelilingi sepuluh negara pantai (RRT dan Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam dan Filipina). Luas perairan Laut Tiongkok Selatan mencakup Teluk Siam yang dibatasi Vietnam, Kamboja, Thailand dan Malaysia serta Teluk Tonkin yang dibatasi Vietnam dan RRT. Kawasan Laut Tiongkok Selatan merupakan kawasan bernilai ekonomis, politis dan strategis yang sangat penting, kondisi geografis posisinya yang strategis sebagai jalur pelayaran perdagangan (SLOT) dan jalur komunikasi internasional (SLOC) yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Hal ini telah merubah jalur Laut Tiongkok Selatan menjadi rute tersibuk di dunia, karena lebih dari setengah perdagangan dunia berlayar melewati Laut Tiongkok Selatan setiap tahun. Data perdagangan 3 negara raksasa ekonomi (India, Amerika Serikat dan Jepang). Diperkirakan lebih dari setengah jumlah kapal-kapal super tanker dunia melewati jalur laut ini.
2. Potensi ekonomi dan pentingnya geopolitik termasuk kandungan kekayaan alam yang ada di dalamnya telah menyebabkan terjadinya konflik klaim wilayah antara Tiongkok dan sebagian negara-negara anggota ASEAN yang berada wilayah Laut Tiongkok Selatan. Menurut data Kementerian Geologi dan Sumber Daya Mineral Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memperkirakan bahwa wilayah Spratly mempunyai cadangan minyak dan gas alam 17,7 miliar ton ( $1.60 \times 10^{10}$  kg), lebih besar dibandingkan dengan Kuwait negara yang menempati ranking ke 4 yang mempunyai cadangan minyak terbesar dunia saat ini dengan jumlah 13 miliar ton ( $1,17 \times 10^{10}$  kg). Sementara kandungan gas alam di Laut Tiongkok Selatan mungkin merupakan sumber hidrokarbon yang paling melimpah. Sebagian besar hidrokarbon kawasan Laut Tiongkok Selatan dieksplorasi oleh Brunei, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina. Perkiraan menurut United States Geological Survey dan sumber lain-lain menunjukkan bahwa sekitar 60% -70% dari hidrokarbon di Laut Tiongkok

<sup>3</sup>[http://www.lemhannas.go.id/portal/attachments/1960\\_tannas%20karmin%20-%20konflik%20dan%20solusi%20laut%20china%20selatan.pdf](http://www.lemhannas.go.id/portal/attachments/1960_tannas%20karmin%20-%20konflik%20dan%20solusi%20laut%20china%20selatan.pdf) diakses pada 29 Mei 2015, pukul 10:36 Wib.

Selatan adalah gas. Sementara itu, penggunaan gas alam di wilayah ini diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5% per tahun selama dua dekade mendatang, diperkirakan bisa mencapai sebanyak 20 triliun kaki kubik (Tcf) per tahun lebih cepat daripada bahan bakar lainnya. Potensi kandungan cadangan minyak dan gas di Laut Tiongkok Selatan ini juga telah memicu semakin intensifnya situasi klaim teritorial dari negara-negara yang terlibat.

Laut Tiongkok Selatan merupakan bagian dari Samudra Pasifik yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3.5 juta km<sup>2</sup>.<sup>4</sup> Berdasarkan ukurannya, Laut Tiongkok Selatan ini merupakan wilayah perairan terluas kedua setelah kelima samudera. Laut Tiongkok Selatan merupakan sebuah perairan dengan berbagai potensi yang sangat besar karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam dan selain itu juga peranannya sangat penting sebagai jalur distribusi minyak dunia, perdagangan dan pelayaran internasional.

Sesuai dengan uraian dan penjelasan yang telah penulis kemukakan maka dalam penulisan ini diambil judul "*Pengaruh Konflik Laut Tiongkok Selatan Terhadap Stabilitas Keamanan Asia Tenggara Tahun 1947-2011*"

## B. METODE PENELITIAN

Dalam hal ini maka diperlukan metode untuk sebuah penelitian penulisan sejarah yang digunakan sebagai patokan dalam meneliti dan menceritakan kisah sejarah yang akan memberikan rekonstruksi yang jelas dalam melukiskan peristiwa sejarah.

"Yang dinamakan metode sejarah di sini ialah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau."<sup>5</sup>

Pengertian lainnya bahwa metode historis adalah:<sup>6</sup>

*Define the problems or questions to be investigated; search for sources of historical facts; summarize and evaluate the historical sources; and present the pertinent facts within an interpretative framework.*

Menggambarkan permasalahan atau pertanyaan untuk diselidiki; mencari sumber tentang fakta historis; meringkas dan mengevaluasi sumber-sumber historis; dan menyajikan fakta-fakta yang bersangkutan dalam suatu kerangka interpretatif.

Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode historis atau dokumenter, yang dapat digunakan dalam pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan Pengaruh Konflik Laut Tiongkok Selatan Terhadap Stabilitas Keamanan Asia Tenggara tahun 1947-2011. Terdapat empat tahap proses metode sejarah yakni:<sup>7</sup>

1. Heuristik, adalah proses mencari untuk menemukan sumber-sumber.

<sup>4</sup> *Laut Tiongkok Selatan*, [www.anneahira.com/laut-Tiongkok-selatan.html](http://www.anneahira.com/laut-Tiongkok-selatan.html). Diakses tanggal 28 April 2015.

<sup>5</sup> Louis Gottschalk (1986:32) seperti dikutip oleh Syukrizal, (Skripsi, 2013:30).

<sup>6</sup> Edson, 1986:20 seperti dikutip oleh Dadang Supardan, 2007:306.

<sup>7</sup> Didalam buku *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer* Nugroho Notosusanto, 1984:11-12 seperti dikutip oleh Syukrizal (Skripsi, 2013:31).

2. Kritik, yaitu pengujian sumber yang ditemukan yang bertujuan untuk menyeleksi data menjadi fakta. Ada dua macam kritik yakni ektern dan kritik intern.
3. Interpretasi, yakni tahap penafsiran.
4. Historiografi, yaitu penulisan sejarah (berasal dari *graphein* dalam bahasa Yunani).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sejarah dan awal mula konflik Laut Tiongkok Selatan

Sengketa kepemilikan atau kedaulatan teritorial di Laut Tiongkok Selatan sesungguhnya merujuk pada kawasan laut dan daratan di dua gugusan Kepulauan Paracel dan Spratly. Dalam kedua gugusan kepulauan tersebut terdapat pulau yang tidak berpenghuni, atol atau karang. Wilayah yang menjadi ajang perebutan klaim kedaulatan wilayah ini terbentang ratusan mil dari Selatan hingga Timur di Provinsi Hainan. Republik Rakyat Tiongkok menyatakan klaim mereka berasal dari 2000 tahun lalu, saat kawasan Paracel dan Spratly telah menjadi bagian dari bangsa Tiongkok. Menurut Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, pada tahun 1947 Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok telah mengeluarkan peta yang merinci klaim kedaulatan Republik Rakyat Tiongkok atas wilayah Laut Tiongkok Selatan.

### 2. Penyebab Laut Tiongkok Selatan Menjadi Sumber Konflik

Perkembangan militer dan pengaruh Geopolitik Tiongkok yang semakin besar di kawasan ASEAN yang dahulunya merupakan "wilayah kekuasaan" Amerika Serikat sebagai "penguasa tunggal" pasca tumbangannya Uni Soviet (Perang Dingin) tahun 1991. Perkembangan Militer Tiongkok yang begitu pesat membuat pengaruh Tiongkok begitu kuat di ASEAN, bahkan sudah bisa menandingi pengaruh Amerika Serikat dan Sekutunya di ASEAN. Amerika Serikat yang tidak ingin kehilangan pengaruhnya di ASEAN akhirnya mengubah fokus kehadiran militer mereka yang semula di fokuskan di Timur Tengah bergeser ke Asia Pasifik. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh pemerintah AS dan ditandai dengan penempatan sekitar 2500 personel Marinir AS di Australia.

Kawasan Laut Tiongkok Selatan di ASEAN yang merupakan jalur pelayaran paling sibuk di dunia, memiliki makna yang sangat penting bagi Amerika Serikat maupun Tiongkok. Jika mereka bisa menguasai Laut Tiongkok Selatan, maka secara otomatis mereka menguasai jalur perdagangan ekonomi yang sangat besar dan akan menaikkan daya tawar negara mereka. Amerika yang selama ini berkuasa di sana, sekarang sudah mendapat penantang baru yaitu Tiongkok.

Beberapa aspek yang membuat Laut Tiongkok Selatan menjadi penting bagi negara manapun, yakni:<sup>8</sup>

1. Letak Strategis. Secara Geografi Laut Tiongkok Selatan dikelilingi sepuluh negara pantai (RRT dan Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia,

<sup>8</sup>[http://www.lmhannas.go.id/portal/attachments/1960\\_tannas%20karmin%20-%20konflik%20dan%20solusi%20laut%20china%20selatan.pdf](http://www.lmhannas.go.id/portal/attachments/1960_tannas%20karmin%20-%20konflik%20dan%20solusi%20laut%20china%20selatan.pdf) diakses pada 29 Mei 2015, pukul 10:36 Wib.

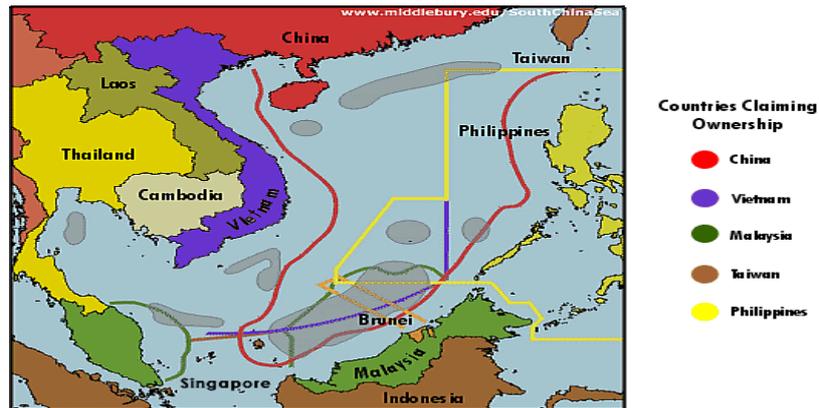
Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam dan Filipina). Luas perairan Laut Tiongkok Selatan mencakup Teluk Siam yang dibatasi Vietnam, Kamboja, Thailand dan Malaysia serta Teluk Tonkin yang dibatasi Vietnam dan RRT. Kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan kawasan bernilai ekonomis, politis dan strategis yang sangat penting, kondisi geografis posisinya yang strategis sebagai jalur pelayaran perdagangan dan jalur komunikasi internasional yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Hal ini telah merubah jalur Laut Tiongkok Selatan menjadi rute tersibuk di dunia, karena lebih dari setengah perdagangan dunia berlayar melewati Laut Tiongkok Selatan setiap tahun. Data perdagangan 3 negara raksasa ekonomi (India, Amerika Serikat dan Jepang). Diperkirakan lebih dari setengah jumlah kapal-kapal super tanker dunia melewati jalur laut ini.

2. Potensi ekonomi dan pentingnya geopolitik termasuk kandungan kekayaan alam yang ada di dalamnya telah menyebabkan terjadinya konflik klaim wilayah antara Tiongkok dan sebagian negara-negara anggota ASEAN yang berada wilayah Laut Tiongkok Selatan. Menurut data Kementerian Geologi dan Sumber Daya Mineral Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memperkirakan bahwa wilayah Spratly mempunyai cadangan minyak dan gas alam 17,7 miliar ton ( $1.60 \times 10^{10}$  kg), lebih besar dibandingkan dengan Kuwait negara yang menempati ranking ke 4 yang mempunyai cadangan minyak terbesar dunia saat ini dengan jumlah 13 miliar ton ( $1,17 \times 10^{10}$  kg). Sementara kandungan gas alam di Laut Tiongkok Selatan mungkin merupakan sumber hidrokarbon yang paling melimpah. Sebagian besar hidrokarbon kawasan Laut Tiongkok Selatan dieksplorasi oleh Brunei, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filipina. Perkiraan menurut United States Geological Survey dan sumber lain-lain menunjukkan bahwa sekitar 60% -70% dari hidrokarbon di LTS adalah gas. Sementara itu, penggunaan gas alam di wilayah ini diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5% per tahun selama dua dekade mendatang, diperkirakan bisa mencapai sebanyak 20 triliun kaki kubik (Tcf) per tahun lebih cepat daripada bahan bakar lainnya. Potensi kandungan cadangan minyak dan gas di LTS ini juga telah memicu semakin intensifnya situasi klaim teritorial dari negara-negara yang terlibat.

Laut Tiongkok Selatan merupakan bagian dari Samudra Pasifik yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3.5 juta km<sup>2</sup>.<sup>9</sup> Berdasarkan ukurannya, Laut Tiongkok Selatan ini merupakan wilayah perairan terluas atau terluas kedua setelah kelima samudra. Laut Tiongkok Selatan merupakan sebuah perairan dengan berbagai potensi yang sangat besar karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam dan selain itu juga perannya sangat penting sebagai jalur distribusi minyak dunia, perdagangan, dan pelayaran internasional.

---

<sup>9</sup> *Laut Tiongkok Selatan*, [www.anneahira.com/laut-Tiongkok-selatan.html](http://www.anneahira.com/laut-Tiongkok-selatan.html). Diakses tanggal 28 April 2015.



Gambar 5.2 : Peta negara-negara pengklaim Laut Tiongkok Selatan

### 3. Negara yang Terlibat dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan

Sengketa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan sangatlah kompleks karena adanya tumpang tindih klaim antar negara pengklaim. Tumpang tindih ini terjadi karena wilayah perbatasan teritorial satu negara pengklaim bertindihan dengan negara lain. Saat ini terdapat dua sengketa di kawasan Laut Tiongkok selatan, yaitu sengketa teritorial kawasan Kepulauan Spratly, Paracel dan kepulauan lainnya (selain dua kepulauan tersebut terdapat juga kawasan Kepulauan Pratas yang dikenal sebagai Dongsha, dan Maccesfield Bank yang dikenal sebagai *Quan Dao Trung Sa* atau *Zhongsha Qundao*) dan sengketa perbatasan kawasan laut akibat tumpang tindihnya klaim landas batas maritim antara negara-negara di kawasan tersebut.

Tabel di bawah ini meringkas berbagai klaim yang dibuat oleh negara-negara di sekitar kawasan Laut Tiongkok Selatan secara khusus, klaim ke enam negara yang bersengketa di Laut Tiongkok Selatan akan dijabarkan sebagai berikut.

1. Klaim Brunei di Laut Tiongkok Selatan hanya terbatas atas kawasan ZEE saja yang dihitung dari satu karang paling selatan di Kepulauan Spratly. Akan tetapi Brunei tidak membuat klaim formal atas Kepulauan Spratly serta tidak mengklaim Kepulauan Paracel
2. RRT mengklaim hampir semua dari kawasan Laut Tiongkok Selatan dengan klaim atas keseluruhan Kepulauan Spratly (RRT menyebutnya Kepulauan Nansha) dan menempatkan pasukan militernya di beberapa pulau di kepulauan ini. Pada tahun 1974, RRT merebut Kepulauan Paracel dari Vietnam dan mempertahankan kekuasaannya di pulau-pulau tersebut sampai saat ini. Klaim RRT di Laut Tiongkok Selatan adalah berdasarkan ZEE dan prinsip landas kontinental serta catatan sejarah Dinasti Han (110 Masehi) dan Dinasti Ming (1403-1433 Masehi), RRT juga mengklaim Kepulauan Pratas.
3. Klaim Malaysia di Laut Tiongkok Selatan hanya terbatas pada klaim untuk menentukan ZEE dan batas landas kontinental saja serta hanya mengklaim 3 pulau di Spratly. Upaya yang dilakukan Malaysia untuk memperkuat klaimnya di salah satu pulau yang diklaimnya adalah dengan membangun pariwisata di sana dan melakukan penambahan tanah sehingga meningkatkan ketinggian pulau yang lain. Meskipun demikian, Malaysia tidak membuat klaim atas Kepulauan Paracel.

4. Filipina mengklaim porsi yang cukup signifikan di Laut Tiongkok Selatan dengan menguasai 8 pulau di Kepulauan Spratly (Filipina menyebutnya Kalayaan). Namun, Filipina tidak mengklaim Kepulauan Paracel. Klaim Filipina didasari oleh ZEE dan batas landas kontinental serta sebuah ekspedisi penjelajah Filipina pada tahun 1956.
5. Taiwan mengklaim hampir seluruh kawasan Laut Tiongkok Selatan, mengklaim semua pulau di Kepulauan Spratly dan Paracel dengan dasar yang sama seperti klaim yang dibuat oleh RRT. Taiwan juga mengklaim Kepulauan Pratas.
6. Vietnam mengklaim hampir semua kawasan Laut Tiongkok Selatan berdasarkan ZEE dan batas landas kontinentalnya. Vietnam mengklaim Kepulauan Spratly (Vietnam menyebutnya Trong Sa) dan telah menghuni 20 pulau yang ada di Kepulauan tersebut. Meskipun RRT telah merebut Paracel dari Vietnam pada tahun 1974, namun Vietnam tetap mengklaim Kepulauan Paracel (Vietnam menyebutnya Hong Sa). Vietnam juga mengklaim Teluk Thailand berdasarkan ZEE dan batas landas kontinentalnya.

**Tabel 5.1: Klaim Teritorial Negara-negara di Sekitar Kawasan Laut Tiongkok Selatan<sup>10</sup>**

<b>Negara</b>	<b>Laut Tiongkok Selatan</b>	<b>Kepulauan Spratly</b>	<b>Kepulauan Paracel</b>	<b>Teluk thailand</b>
<b>Brunei</b>	<b>UNCLOS</b>	<b>Tidak ada klaim formal</b>	<b>Tidak mengklaim</b>	<b>Tidak ada keterangan</b>
<b>Kamboja</b>	<b>Tidak ada keterangan</b>	<b>Tidak ada keterangan</b>	<b>Tidak ada keterangan</b>	<b>UNCLOS</b>
<b>RRT</b>	<b>Semua diklaim</b>	<b>Semua diklaim</b>	<b>Semua diklaim</b>	<b>Tidak ada keterangan</b>
<b>Indonesia</b>	<b>UNCLOS</b>	<b>Tidak mengklaim</b>	<b>Tidak mengklaim</b>	<b>Tidak ada keterangan</b>
<b>Malaysia</b>	<b>UNCLOS</b>	<b>3 pulau</b>	<b>Tidak mengklaim</b>	<b>UNCLOS</b>
<b>Filipina</b>	<b>Jumlah yang signifikan</b>	<b>8 pulau</b>	<b>Tidak mengklaim</b>	<b>Tidak ada keterangan</b>
<b>Taiwan</b>	<b>Semua diklaim</b>	<b>Semua diklaim</b>	<b>Semua diklaim</b>	<b>Tidak ada keterangan</b>
<b>Thailand</b>	<b>Tidak ada keterangan</b>	<b>Tidak ada keterangan</b>	<b>Tidak ada keterangan</b>	<b>UNCLOS</b>
<b>Vietnam</b>	<b>Semua diklaim</b>	<b>Semua diklaim</b>	<b>Semua diklaim</b>	<b>UNCLOS</b>

<sup>10</sup> Nuri Widiastuti Veronika (Tesis). 2010. *Pengaruh Komponen Geopolitik Terhadap Konflik di Laut Tiongkok Selatan antara Tiongkok dan Vietnam pada periode 2009-2011*. Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia. Hal 44.

#### **4. Proses Eskalasi Konflik Laut Tiongkok Selatan**

Pengaruh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di kawasan sangat besar khususnya dalam konflik di Laut Tiongkok Selatan. RRT sangat agresif dalam mempertahankan kawasan Laut Tiongkok Selatan yang diketahui memiliki potensi sumber daya alam dan potensi geostrategis dan juga diklaim oleh beberapa negara. Kawasan Asia Timur, khususnya dan dunia pada umumnya kini menghadapi suatu tantangan baru, yaitu meningkatnya RRT sebagai kekuatan besar. RRT memang berhak menjadi pemain utama di kawasan. Namun, masalahnya ialah kekuatannya yang muncul mendadak, ekspansi ekonominya yang semakin luas dan tekanan-tekanan yang dilakukannya dalam menjalankan diplomasinya menimbulkan kekhawatiran, terutama di kalangan tetangga RRT.

Sampai saat ini konflik klaim tumpang tindih yang terjadi di wilayah Laut Tiongkok Selatan masih terus berlangsung dan menjadi perdebatan antara beberapa negara di kawasan ASEAN melalui perundingan diplomasi. Diketahui pada tanggal 15 juni 2011, kapal patroli maritim milik RRT, Haixun 31, berlabuh di Singapura setelah berangkat dari RRT. Dalam perjalanannya diketahui kapal itu telah melewati perairan di sekitar kepulauan Paracel dan Sparty, yang menjadi sumber sengketa Laut Tiongkok Selatan.

#### **5. Dampak Konflik Laut Tiongkok Selatan terhadap Stabilitas Keamanan Asia Tenggara**

Secara geostrategis, kawasan Laut Tiongkok Selatan juga memiliki arti penting bagi strategi militer, khususnya untuk manuver kapal selam nuklir dan deterrence. Ini bisa diartikan bahwa kehadiran RRT di kawasan ini tidak ingin sekedar menciptakan ZEE yang luas tetapi juga ingin mengendalikan lautan untuk mencapai proyeksi kekuatan yang lebih jauh, baik itu di sekitar Samudera Pasifik maupun Samudera Hindia. Saat ini misi utama dari militer RRT atau People's Liberation Army (PLA) adalah:

- a. Mengamankan kapal masuk Taiwan;
- b. Menjalankan operasi di Pasifik Barat untuk menghalangi musuh;
- c. Melindungi jalur komunikasi laut China;
- d. Memutus jalur komunikasi musuh.

#### **6. Peranan ASEAN Untuk Menjaga Stabilitas Keamanan Asia Tenggara**

Berikut ini bentuk keikutsertaan ASEAN dalam masalah Konflik Laut Tiongkok Selatan, yaitu :<sup>11</sup>

- a. Lokakarya "Managing Potential Conflicts the South China Sea  
Kegiatan pertama dalam rangka menyelesaikan konflik Laut Tiongkok Selatan yang bersifat multilateral tersebut dimotori oleh Indonesia, pertama

---

<sup>11</sup> Dikutip dari Ahmad Almaududy Amri, *Laut Tiongkok Selatan: Problematika dan Prospek Penyelesaian Masalah*. Jurnal Opini Juris Vol. 16 Mei –September 2014

kali dilangsungkan pada tahun 1990 dan disponsori oleh Kanada. Lokakarya ini bertujuan untuk menjalin *confidence building* di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Namun karena sifatnya yang 1,5 track (bukan mengatasnamakan negara tapi bukan juga pihak privat), kurang menyentuh akar permasalahan karena pembahasan dalam lokakarya yang dilakukan setiap tahun ini menghindari masalah-masalah yang berbau yurisdiksi kedaulatan dan hanya fokus pada *low level cooperation*. Namun pertemuan tersebut tidak dapat dipandang sebelah mata karena salah satu pertemuannya yang dilakukan pada tahun 1991 di Bandung merupakan cikal bakal terbentuknya ASEAN *Declaration on South China Sea*.

b. *ASEAN Declaration on South China Sea*

Deklarasi yang dilakukan di Manila pada tahun 1992 tersebut merupakan hasil dari lokakarya yang dilaksanakan di Bandung sebagaimana disebutkan di atas. Deklarasi tersebut tidak mencakup permasalahan yurisdiksi kedaulatan melainkan langkah awal untuk memformulasi *Code of Conduct* (COC) yang bersifat tidak mengikat, berdasar pada penyelesaian sengketa secara damai dan tidak menggunakan kekerasan. Selain itu, deklarasi ini tunduk pada norma dan prinsip *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) tahun 1976. Tiongkok sebagai salah satu *claimant states* yang terbesar tidak mendukung deklarasi ini, Tiongkok lebih menginginkan penyelesaian melalui jalur bilateral. Namun pada tahun 1995 Tiongkok sudah mulai membuka diri untuk membicarakan Laut Tiongkok Selatan di tingkat multilateral khusus pada kasus pulau Spratly dan sepakat menggunakan UNCLOS sebagai dasar negosiasi.

- c. Pada pertemuan informal ASEAN Summit yang dilangsungkan tahun 1999, Filipina yang didukung oleh Vietnam mengajukan draft CoC yang pada intinya bertujuan untuk mengalihkan pendudukan atas objek sengketa, memuat ketentuan yang lebih spesifik dari deklarasi Manila dan mengusulkan untuk melangsungkan *joint development* di pulau Spratly. Proposal tersebut ditolak oleh Malaysia dan Tiongkok. Malaysia beranggapan hal tersebut terlalu legalistik dan menyinggung perihal kedaulatan.
- d. Malaysia mencoba peruntungannya dengan mengajukan deklarasi bersama atas pulau Spratly pada pertemuan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) yang ke-35 di Brunei pada tahun 2002. Langkah tersebut dimentahkan oleh sebagian besar anggota ASEAN karena tidak jelas apakah kesepakatan akan diabadikan dalam bentuk deklarasi atau CoC. Karena konsensus tidak tercapai, para Menteri Luar Negeri sepakat untuk bernegosiasi dengan Tiongkok guna mendeklarasikan bersama *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*.

e. *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*

Deklarasi ini ditandatangani oleh Tiongkok dan ASEAN di Phnom Penh pada bulan November 2002. Deklarasi ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan dan konflik militer di LTS. Selain itu, deklarasi tersebut juga berpedoman pada UN Charter, UNCLOS, dan TAC.

f. Code of Conduct

Upaya puncak yang dilakukan oleh ASEAN dalam rangka menyelesaikan masalah LTS bentuk COC belum dapat diterima secara bulat oleh negara anggota ASEAN. KTT ASEAN ke-21 yang berlangsung di Phnom Penh belum menyepakati CoC sebagai perangkat yang diyakini dapat menyelesaikan polemik LTS. Namun dengan dibahasnya CoC yang pada awalnya dirancang oleh Filipina ini, menunjukkan iktikad baik para pihak terkait untuk lebih serius menyelesaikan masalah dengan memasukkan konten hukum di dalamnya terutama yang menyangkut dispute settlement melalui framework ASEAN (TAC) atau melalui mekanisme yang sejalan dengan hukum internasional termasuk UNCLOS.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Tingginya dinamika interaksi di Laut Tiongkok Selatan menunjukkan besarnya kapabilitas ekonomi, politik, dan militer di kawasan ini. Konflik perbatasan dan klaim tumpang tindih yang terjadi di Kawasan Laut Tiongkok Selatan masih kerap terjadi di antara Negara-negara yang berbatasan langsung dengan perairan yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki posisi yang sangat strategis dan hal ini menjadi perdebatan antar beberapa negara-negara pengklaim kawasan tersebut. Beberapa upaya telah dilakukan dalam mengatasi konflik yang terjadi di kawasan Laut Tiongkok Selatan salah satunya yakni dengan cara diadakannya perundingan-perundingan yang melibatkan beberapa negara yang berkonflik hal ini ditujukan untuk meredam konflik yang tengah terjadi di kawasan tersebut. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan dan yang melibatkan Republik Rakyat Tiongkok (RRC), Vietnam, Malaysia, Taiwan, Filipina, dan Brunei Darussalam ini menimbulkan implikasi-implikasi politik dan keamanan yang diakibatkan oleh adanya pergesekan kepentingan-kepentingan di antara Negara-negara yang terlibat tersebut demi kepentingan masing-masing negara.

Apabila implikasi-implikasi tersebut dibiarkan begitu saja, dan tidak ditangani dengan cepat maka dapat tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perang terbuka, yang dapat merugikan negara-negara yang berkonflik, dan juga negara-negara yang ada di sekitar Laut Tiongkok Selatan.

## 2. Rekomendasi

Kawasan Laut Tiongkok Selatan adalah kawasan yang sudah sejak lama terguncang konflik. Ditandai dengan adanya klaim-klaim kepemilikan oleh beberapa negara yang menginginkan kawasan ini. Dengan demikian maka sangatlah penting untuk segera menuntaskan dan menangani konflik yang terjadi di kawasan Laut Tiongkok Selatan tersebut karena apabila tidak ditangani secara serius maka akan berdampak buruk bagi negara-negara yang berkonflik dan yang berada sekitar kawasan Laut Tiongkok Selatan, maupun negara-negara luar yang memiliki kepentingan tersendiri di kawasan Laut Tiongkok Selatan.

Dalam konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan memang rumit. Selain RRT yang mengklaim kepemilikan kawasan Laut Tiongkok Selatan terdapat pula Taiwan dan empat negara ASEAN Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Situasi di kawasan itu sendiri sering menimbulkan ketegangan setelah terjadi perang kata-kata antara Filipina dengan RRT maupun, Vietnam dengan RRT.

Setelah menganalisis mengenai aspek politik dan keamanan konflik di Laut Tiongkok Selatan, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan :

1. Bagi pemerintah Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN, sebaiknya memperhatikan konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan menanggapi dengan serius masalah klaim teritorial yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan, dapat mengambil tindakan dan melakukan penanganan secara cepat bagi konflik yang dapat membahayakan dan mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan, yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap keamanan negara-negara ASEAN, dan negara-negara yang ada disekitar Laut Tiongkok Selatan. Selain itu juga apabila konflik ini tidak ditanggapi dengan serius dan dibiarkan begitu saja maka segala bentuk kerjasama di kawasan Laut Tiongkok Selatan bisa kehilangan daya dukung dan tidak berkelanjutan.
2. Dengan melihat kondisi Laut Tiongkok Selatan sebagai kawasan yang selalu terguncang konflik, sehingga sebaiknya diadakan suatu lembaga yang dapat mengatur negara-negara yang berkonflik dalam klaim kawasan Laut Tiongkok Selatan, di mana di dalamnya akan membicarakan mengenai penyelesaian secara diplomatik yang nantinya akan melibatkan negara-negara yang berkonflik dalam suatu perundingan mengenai proses penyelesaian konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan dalam mengkaji masalah-masalah, prospek, dan tantangan di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Di mana lembaga ini nantinya akan dapat berperan untuk membantu negara-negara yang terlibat konflik dalam pemecahan konflik di Laut Tiongkok Selatan. Dengan diadakannya penyelesaian secara diplomatik dengan cara mempertemukan negara-negara yang terlibat dalam konflik Laut Tiongkok Selatan dikumpulkan untuk melakukan perundingan yang nantinya akan bisa disepakati bersama dan bisa segera menuntaskan sengketa melalui aturan-aturan yang telah disepakati bersama maka hal ini diharapkan pada perkembangannya dapat berperan sebagai institusi yang membantu dalam mengatasi konflik yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan.
3. Dalam suatu perundingan, atau pertemuan-pertemuan yang diadakan dengan melibatkan semua negara pengklaim Laut Tiongkok Selatan, dalam perundingan tersebut dapat disarankan bagi negara-negara pengklaim untuk

bersama-sama dalam memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki Laut Tiongkok Selatan, baik potensi sumber daya alam, maupun potensi geografisnya. Sehingga terjadi suatu kerja sama dalam pengelolaan potensi yang dimiliki Laut Tiongkok Selatan secara bersama-sama.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jogjakarta: Ar-ruuz Media.
- Almaududy Amri, Ahmad. *Laut Tiongkok Selatan: Problematika dan Prospek Penyelesaian Masalah*. Jurnal Opinio Juris Vol. 16 Mei –September 2014.
- Bakrie, Cornie R. 2010. *Membangun Kekuatan Sistem Pertahanan dan Postur TNI dalam Majalah Pemikiran Sosial Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.
- C. Plano, Jack, 1985. *Kamus Analisa Politik*, Terjemahan Drs. S Siregar, Jakarta: CV. Rajawali.
- Dam, Syamsumar. 2010. *Politik Kelautan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenada Media.
- Djafar, Zainuddin. 1990. *Studi Hubungan Internasional dan Masalah-masalah Teoritisnya*, Jakarta: hal 105
- Frankel, Joseph. 1988. *Teori Kontemporer Tentang Tingkah Laku Negara*. Jakarta : Bina Aksara. Hal 121.
- Frankel, Joseph. 1990. *Hubungan Internasional*. Jakarta: ANS Sungguh Bersaudara.
- Griffiths, Martin. 1999. *Fifty Key Thinkers in International Relations*. Terjemahan oleh Mahyudin & Makmur, Izamuddin. 2001. Lima Puluh Pemikir Studi Hubungan Internasional. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hariyanto, Rudi (Skripsi). 2013. *Peranan Sultan Hamengku Buwono IX dalam Menghadapi Agresi Militer Belanda I dan II (1945-1949)*. Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Riau. Pekanbaru.
- Hermawan, Yulius P. 2007. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Holsty, K.J. 1988. *Politik Internasional Kerangka untuk Analisis, edisi keempat jilid 2*, terjemahan: M.Tahir Azhary, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Ikbar, Yanuar. 1995. *Ekonomi Politik Internasional*. Bandung: Angkasa Bandung.

- Irsyam, Ardian (Skripsi). 2016. Sejarah Perang Perang Enam Hari Arab-Israel (1967). Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Riau.
- Lutfi, Muchtar. 1977. *Sejarah Riau*. Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi Budaya Riau, Pekanbaru.
- Merrills, J.G (Penyadur Achmad Fauzan, S.H). *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Penerbit Tarbito : Bandung.
- Miall, Hugh. 1999. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, terjemahan Tri Budhi Satrio. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nasution, Dahlan. 1991. *Politik Internasional: Konsep dan Teori*, Jakarta: Erlangga. Hal.53
- Restuning Tunggal, Aprilia. 2013. *Ilmu Hubungan Internasional, Politik, Ekonomi, Keamanan, dan Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riswanto (Skripsi). 2013. *Konflik Muslim Moro dengan Pemerintah Filipina tahun 1968-1996 (Suatu Kajian Historis)*. Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Riau.
- Ritzer, George. 2010. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suharna, Karmin. 2012. “*Konflik dan Solusi Laut Tiongkok Selatan dan Dampaknya bagi Ketahanan Nasional*” Majalah TANNAS edisi 94.
- Sofyandi Herman, Iwa Garniwa. 2007. *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Supardan, Dadang. 2007. *Pengantar Ilmus Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syukrizal (Skripsi). 2013. *Perjuangan Masyarakat Dumai sebagai Kota Administratif Menuju Kota Madya di Era Reformasi Tahun 1998-1999*. Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Riau (UR).
- Veronika, Nuri Widiastuti, dalam Jurnal Ilmiah Hubungan International Universitas Katolik Parahyangan, Vol. 7 No. 2, September 2011. Berjudul "*Dari Uang ke Senjata: Kompetesi Ekonomi dan Pengaruhnya Terhadap Keamanan Kawasan Asia Pasifik*"
- Veronika, Nuri Widiastuti (Tesis). 2010. *Pengaruh Komponen Geopolitik Terhadap Konflik di Laut Tiongkok Selatan antara Tiongkok dan Vietnam pada periode*

2009-2011. Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia.

Victor Muhamad, Simela. *Kepentingan China dan Posisi ASEAN dalam Sengketa Laut China Selatan*. Jurnal Info Singkat Hubungan Internasional. Vol. IV, No. 08/II/P3DI/April/2012.

Wardhani, Baiq. 2014. *Perkuliahan Teori Hubungan Internasional Minggu II: Realisme*. Surabaya. Universitas Airlangga.

### **SUMBER INTERNET**

[www.anneahira.com/laut-Tiongkok-selatan.htm](http://www.anneahira.com/laut-Tiongkok-selatan.htm). Diakses tanggal 28 April 2015

[http://id.wikipedia.org/wiki/Asia Tenggara](http://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara) diakses pada 1 Mei 2015, pukul 23:44 Wib.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Bumi> diakses pada tanggal, 28 April 2015, pukul 13:08 Wib.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik> diakses pada 1 Mei 2015, pukul 22:55 Wib.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Laut Tiongkok Selatan](http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Tiongkok_Selatan) diakses pada 1 Mei 2015, pukul 23:02 Wib.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Realisme %28hubungan internasional%29](http://id.wikipedia.org/wiki/Realisme_%28hubungan_internasional%29) diakses pada 3 Mei 2015, pukul 17:53 Wib

<http://internasional.metrotvnews.com/read/2014/06/19/254733/sengketa-anjungan-minyak-diplomat-tiongkok-marahi-vietnam> diakses pada 1 Mei 2015, pukul 09:16 Wib.

<http://internasional.metrotvnews.com/read/2015/04/30/121149/reklamasi-wilayah-laut-tiongkok-jadi-perhatian-pemimpin-asean> diakses pada 1 Mei 2015, pukul 09:14 Wib.

<http://internasional.metrotvnews.com/read/2015/04/30/121177/tiongkok-bermanuver-wilayah-natuna-bisa-terpengaruh> Diakses pada 1 Mei 2015, pukul 09:04 Wib.

<http://judiono.wordpress.com/2009/01/05/mencermati-sengketa-teritorial-laut-Tiongkok-selatan/htm>, Diakses tanggal 28 April 2015

<http://kbbi.web.id/dampak> diakses pada 1 Mei 2015, pukul 22:57 Wib.

<http://kbbi.web.id/stabilitas> diakses pada 1 Mei 2015, pukul 23:41 wib.